

DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA

ANJU NOFAROF HASUDUNGAN

SMAN 1 Rupert, Provinsi Riau, Indonesia

Submitted:
September 10, 2021
Revised:
October 25, 2021
Published:
November 30, 2021

CONTACT

Correspondence Email:
anjuhasudungan81@guru.sma.belajar.id

Address: Jalan Mesjid,
Kampung Jawa Rupert,
Bengkalis, Kode Pos: 28781

KEYWORDS

Dwifungsi ABRI; Materi
Pengayaan; Politik
Indonesia; Mata
Pelajaran Sejarah
Indonesia

ABSTRACT

Materi pengayaan menjadi materi tambahan bagi peserta didik yang telah menguasai materi dasar yang disebutkan pada Kompetensi Dasar. Membuat materi pengayaan harus memperhatikan kompetensi dasar yang dipelajari dan waktu pemberiannya. Materi pengayaan mengenai Sejarah Campur Tangan ABRI (Militer) dalam Politik Indonesia untuk siswa kelas XII mata pelajaran sejarah Indonesia terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 3.3, 3.4 dan 3.5 pada silabus kurikulum 2013 revisi. Perlu kiranya menampilkan sosok militer bukan saja sebagai elemen bangsa yang menjadi garda terdepan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia tetapi juga terlibat dalam politik kekuasaan dalam sejarah republik Indonesia. Sifat kepahlawanan sangat melekat pada diri seorang tentara. Oleh karena hal tersebut, banyak peserta didik ingin bercita-cita seorang tentara dengan seragam yang gagah dan wibawa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka dilakukan berdasarkan telaah pustaka, yang mengkaji secara khusus tentang pendidikan serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan objek kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, dokumen silabus, artikel jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Diharapkan melalui pemberian materi pengayaan peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir historis (*historical thinking*), kesadaran sejarah (*historical consciousness*). Bahkan dalam hal pragmatis, peserta didik dapat menjawab soal-soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) dan menguasai materi tingkat lanjut.

I. PENDAHULUAN

Materi pengayaan mengenai sejarah dwifungsi ABRI dalam politik Indonesia untuk peserta didik pada kelas XII mata pelajaran sejarah Indonesia terdapat tiga Kompetensi Dasar yang saling berkaitan. Yaitu, (KD) 3.3 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, KD 3.4 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan KD 3.5 Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dalam Silabus sejarah Indonesia pada kurikulum 2013 revisi. Materi pengayaan merupakan materi tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Lailiyah (2017) menjelaskan bahwa materi pengayaan berupaya mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan seni, keterampilan gerak, dsb.

Perlu kiranya menampilkan sosok militer bukan saja sebagai elemen bangsa yang menjadi garda terdepan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia tetapi juga terlibat dalam politik kekuasaan dalam sejarah republik Indonesia. Sifat heroisme sangat melekat pada diri seorang tentara (Pramudita, 2017). Oleh karena hal tersebut, banyak peserta didik ingin menjadi seorang tentara karena sifat heroism tersebut. Melalui materi pengayaan berikut ini diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir historis (*historical thinking*), kesadaran sejarah (*historical consciousness*). Bahkan dalam hal pragmatis, peserta didik dapat menjawab soal-soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) dan menguasai materi tingkat lanjut. Berikut ini penulis akan memaparkan keterlibatan ABRI (Militer) dalam politik Indonesia.

Tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer. Dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, tentara terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di mana tindakan politik dan militer saling menjalin tak terpisahkan (Crouch, 1999). Sistem parlementer tahun 1957 yang membuat peran presiden dan wakil presiden menjadi lemah, jatuh banggunya kabinet dan kegaduhan politik (sipil) membuat militer masuk dalam kancah politik, memanfaatkan situasi "Keadaan Darurat Perang" baik dalam fungsi-fungsi politik, administrasi dan ekonomi. Memperoleh dasar pembenaran terhadap kelanjutan peranan tentara dalam fungsi-fungsi tersebut sesudah krisis terlewati, Kepala Staf Angkatan Darat Mayjend. Abdul Haris nasution merumuskan sebuah konsep yang bernama "jalan tengah" yang menetapkan bahwa pihak tentara tidak akan mencari kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan, namun juga tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap politik (Sjuchro & Besman, 2020). Selain itu, tentara juga menuntut hak mereka untuk tetap duduk dalam pemerintahan, lembaga perwakilan serta administrasi. Seminar pertama yang diselenggarakan pada bulan April 1965, tentara mencetuskan suatu doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata memiliki peranan rangkap yaitu sebagai: kekuatan militer dan kekuatan

sosial politik (Maarif, 2011; Azwar & Suryana, 2021). Sebagai kekuatan sosial politik, kegiatan-kegiatan tentara meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan (Crouch, 1999). Persepsi tentara mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal dari perbedaan yang kabur tentang fungsi militer dan fungsi politik dalam masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Sifat perjuangan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus juga militer. Militer merupakan kelompok kunci dalam dinamika politik di negara sedang berkembang pada umumnya, khususnya di negara dunia ketiga, seperti Indonesia (Leni, 2013).

...*Pertama*, mengapa golongan militer Indonesia campur tangan dalam politik. *Kedua*, mengapa peralihan kekuasaan dari pemerintahan sipil ke militer begitu lambat terjadi, baru berubah setelah munculnya konflik elit antara sipil dan militer. Dan *ketiga* sampai sejauh mana pemimpin-pemimpin sipil harus ikut bertanggung jawab atas campur tangan militer dalam politik Indonesia (Saundhaussen dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1999) menjelaskan secara umum, ada dua kelompok utama yang memandang faktor penyebab campur tangan militer dalam politik, yakni:

1. Kelompok pertama melihat bahwa campur tangan itu lebih disebabkan oleh faktor internal. Dengan demikian, militer dianggap sebagai kelompok kelas kepentingan.
2. Sementara kelompok kedua melihat hal itu diakibatkan oleh struktur politik dan institusional masyarakatnya. Penjelasan kelompok kedua ini, seperti yang pernah ditulis oleh Huntington, menandakan bahwa keterlibatan itu sebagai akibat rapuhnya struktur politik dan institusi masyarakat.

Dorongan internal terhadap keinginan peran militer dalam politik Indonesia semakin besar karena adanya intervensi politik sipil terhadap masalah internal ABRI. Ini tampak dari kian retaknya hubungan elit militer-sipil pada era Demokrasi Parlementer yang kemudian memunculkan peristiwa 17 Oktober 1952 (Utomo, 2019; Maulana & Santosa, 2019). Peristiwa tersebut merupakan penolakan militer secara tegas atas intervensi parpol dalam masalah internalnya. Ini juga menunjukkan bahwa, bagaimanapun, militer merupakan kelompok kepentingan institusional yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan politik di Indonesia. Saat keadaan darurat diberlakukan di berbagai daerah, sebagian besar komposisi struktur politik diisi oleh kalangan militer. Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa campur tangan militer dalam politik lebih didorong oleh kepentingan politik tentara.

Di masa selanjutnya, campur tangan ABRI dalam masalah sipil terus berlanjut. Pada masa transisi dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin (1957-1959), peran militer dalam politik semakin mendapatkan tempatnya karena diberi kesempatan oleh Presiden Soekarno (Anwar, 2020). Kelak, ketika meletusnya Gerakan 30 September 1965, Militer (ABRI) khususnya Angkatan Darat yang menjadi musuh utama Presiden Soekarno. Dan menjatuhkan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden Republik Indonesia serta mengambil alih puncak kekuasaan tersebut (Hasudungan, 2020). Selanjutnya era Demokrasi Terpimpin inilah militer mulai leluasa memainkan peran sosial politik dan ekonomi. Pada era tersebut, ABRI sebagai garda revolusi diberi

peran yang sangat luas dalam penyelenggaraan negara dan pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing.

Semakin kuatnya peran politik militer pada masa itu tidak hanya cikal bakal dominasi militer dalam perpolitikan di Indonesia, tetapi kemudian juga menjadi model pada era berikutnya hingga sekarang. Era berikutnya yang dimaksud yakni, pemerintahan Presiden Soeharto (Orba), dengan dwifungsi ABRI nya (Suryawan & Sumarjana, 2020).

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi pustaka (studi literatur). Creswell (1994) menjelaskan literatur adalah studi penelitian yang memenuhi beberapa tujuan yakni, pertama, membaca hasil penelitian lain yang terkait erat dengan penelitian yang dilaporkan. Kedua, menghubungkan studi dengan dialog yang lebih besar dan berkelanjutan dalam literatur tentang suatu topik, mengisi kesenjangan dan memperluas studi sebelumnya. Ketiga, memberikan kerangka kerja untuk menetapkan pentingnya penelitian, serta tolok ukur untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan lainnya. Berdasarkan pengalaman penelitian masa lalu, literatur membantu memvalidasi hipotesis atau teori uji dan dengan demikian membuat akumulasi temuan yang berkembang mengarah ke arah penelitian baru. Saat memulai mencari sumber, akan ditemukan lebih dari yang dapat digunakan, jadi harus segera mengevaluasi kegunaannya; menggunakan dua kriteria: relevansi dan reliabilitas (Booth, Colomb, Williams, Bizup, & Fitzgerald, 2016). Nurhuda & Agesti (2021) menjelaskan bahwa pembahasan dalam penelitian studi pustaka dilakukan berdasarkan telah pustaka, yang mengkaji secara khusus tentang pendidikan serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan objek kajian. Peneliti dibebankan dengan tanggung jawab untuk hati-hati memeriksa informasi yang relevan untuk menentukan kegunaan, keandalan, dan otoritas sehubungan dengan proyek penelitian di mana mereka terlibat (Allen, 2017). Pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, artikel jurnal, analisis dokumen, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Analisis dokumen dilakukan pada dokumen silabus sejarah Indonesia kelas XII kurikulum 2013 revisi, buku sejarah Indonesia kelas XII terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2018. Materi pengayaan diberikan kepada peserta didik kelas XII IPA 1 dan 2 serta kelas XII IPS 1 di SMAN 1 Rupa Provinsi Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Materi Pengayaan (*Enrichment*)

Hakikatnya materi pengayaan bagi siswa bertujuan agar membantu peserta didik untuk lebih memahami materi yang diajarkan. Darwati (2011) menyarankan guru juga harus mampu untuk melakukan pengayaan-pengayaan materi dari sumber-sumber belajar yang mutakhir agar informasi kesejarahan selalu *up to date*. Krismawati, Warto, & Suryani (2018) mengungkapkan materi

pengayaan adalah solusi untuk memfasilitasi peserta didik dalam mendapatkan pemahaman secara mendalam. Bahkan terdapat *Enrichment Triad Model* yang merupakan suatu model belajar yang adaptif yang diperuntukkan untuk peserta didik yang dianggap cerdas dan dapat diterapkan pada berbagai tingkat pendidikan dan berbagai mata pelajaran (Surya & Nurdin, 2021). Program pengayaan adalah modifikasi dan penambahan kurikulum reguler peserta didik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbakat dalam arti kognitif, afektif, dan psikomotor. Program pengayaan dapat berupa kegiatan, pengalaman, dan materi pelajaran di luar program reguler, menantang kemampuan peserta didik dan menyelesaikan keingintahuan mereka, dan mengisi waktu mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan program materi pengayaan di SMAN 1 Rupert dilakukan diluar jam pembelajaran atau menjadi tugas rumah dengan bentuk belajar mandiri. Penelitian dari (Hasibuan & Aisiah, 2020) menyebutkan terdapat juga bentuk pelaksanaan pengayaan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran sejarah di SMA A Kota Padang melalui belajar mandiri dan pemberian tugas. Bentuk tugas yang diberikan guru saat pelaksanaan pengayaan adalah dengan membuat suatu kesimpulan mengenai materi-materi yang telah dipelajari.

Pengayaan mendorong siswa untuk melihat konsep atau topik yang lebih luas atau mendalam, mendekatinya dengan lensa atau perspektif yang berbeda, atau menghubungkan pada aspek yang lebih bermakna atau bermanfaat bagi dunia nyata tentunya dalam konteks sejarah campur tangan ABRI (militer) dalam politik Indonesia. Komponen utama pengayaan menurut (Taylor, 2019) yakni:

- a. Guru perlu menggunakan informasi data dan evaluasi yang sesuai sebagai pedoman untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting seperti tingkat membaca, kompetensi sejarah, dll. Poin data ini memungkinkan guru untuk menyediakan bahan yang benar-benar tinggi atau meningkatkan pembelajaran tanpa memperkenalkan tingkat kesulitan yang mengecewakan.
- b. Pengayaan harus individual dan mencocokkan kemampuan pelajar. Penilaian untuk mengukur level lexile (membaca) atau kecakapan tingkat matematika memungkinkan guru untuk melihat persis bagaimana mengelompokkan siswa secara efektif untuk kegiatan pengayaan. Memasangkan atau mengelompokkan siswa berdasarkan poin data ini memungkinkan siswa untuk memiliki opsi untuk bekerja secara kolaboratif di antara peserta didik dengan minat dan kemampuan yang sama.
- c. Kegiatan pengayaan harus memperhitungkan pilihan siswa. Ini berarti bahwa, sementara setiap opsi untuk pengayaan harus berputar di sekitar tujuan pembelajaran yang serupa, metode dimana siswa tiba pada tujuan itu dapat sangat berbeda tergantung pada minat atau pilihan mereka.
- d. Pengayaan harus terhubung ke pengetahuan dan/atau materi sebelumnya untuk koneksi lintas kurikuler.

Menurut Majid (dalam Antari, Wendra, & Wisudariani, 2017) menyatakan materi dan waktu pelaksanaan pengajaran pengayaan sebagai berikut, yaitu (1) materi pengayaan diberikan sesuai

dengan kompetensi dasar yang dipelajari. (2) Waktu pelaksanaan pengajaran pengayaan yaitu, (a) setelah mengikuti tes/ujian KD tertentu, (b) setelah mengikuti tes/ujian blok atau kesatuan KD tertentu, dan (c) setelah mengikuti tes/ujian KD atau Blok terakhir pada semester tertentu. Sehingga materi dan waktu pelaksanaan pengajaran pengayaan sangat bergantung pada kompetensi dasar yang dipelajari. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengajaran pengayaan yaitu, peserta didik, guru, media dalam pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan pengajaran pengayaan. Dengan diperhatikannya faktor-faktor tersebut diharapkan pelaksanaan pengajaran pengayaan berjalan dengan lancar.

Dwifungsi ABRI dalam Politik Indonesia sebagai Materi Pengayaan

Tarik ulurnya politik antara sipil dan militer di Indonesia sudah muncul sejak awal kemerdekaan dan disebabkan faktor internal maupun eksternal ABRI. Dari sisi internal, sejak awal sudah ada keinginan ABRI untuk memainkan peran dalam politik Indonesia dan tidak ingin hanya menjadi alat kekuasaan sipil seperti yang berlaku di negara Barat. Hal tersebut juga didukung oleh rapuhnya kekuatan elit sipil yang menjadi penguasa pada era Presiden Soekarno. Pada masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila, terutama pada saat terjadinya pengambilan kekuasaan di Indonesia, 1965-1968, militer semakin mendominasi politik Indonesia. Alasan ABRI mengambil alih kekuasaan karena situasi politik dan ekonomi Indonesia saat itu sangat parah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).

Periode ketiga 1957-1959 sangat kontras dengan periode sebelumnya (awal kemerdekaan); dengan pecahnya pemberontakan regional dan deklarasi darurat militer (peristiwa yang bertepatan dengan dan menandai lonceng kematian demokrasi parlementer gaya liberal), para pemimpin militer memperoleh kekuasaan yang sangat besar di sektor non-militer, kekuasaan yang sama sekali tidak segan-segan mereka gunakan dalam upaya mereka untuk "meningkatkan" kerja sistem dan memajukan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Peningkatan dramatis pengaruh tentara di masyarakat ini pertama-tama dilegitimasi oleh darurat militer dan kemudian oleh doktrin dwifungsi Nasution (Jenkins, 1983). Periode 1959-1966, ABRI mendapatkan kompetitor yang relatif mampu mengimbangi mereka dalam hal pengaruh kekuasaan politik di Indonesia yaitu, Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga, PKI muncul sebagai kelompok politik baru yang menarik perhatian bangsa Indonesia, menyusul Soekarno dan ABRI yang telah terlebih dahulu pada posisi tersebut. Feith (1964) menyebutkannya sebagai segitiga kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Setelah orde lama runtuh, maka telah dimulai sebuah periode rezim otoriter-militer yang berkuasa selama hampir 32 tahun di bawah komando Presiden Soeharto. Menyadari bahwa militer merupakan kekuatan yang paling terorganisir, solid dan secara kultural bersikap hierarki dan komando, maka ABRI merupakan sasaran utama Presiden Soeharto dalam melanggengkan kekuasaannya melalui budaya politik patrimonial (Cipta, 2020).

Kadi (2000) menjelaskan bahwa patrimonial adalah upaya menempatkan penguasa sebagai sesuatu kekuatan yang tunggal yang dengan kekuasaannya mampu memenuhi segenap kekuatan,

sehingga pada akhirnya tercipta suatu ketergantungan yang menyebabkan tidak adanya pilihan selain menuruti kehendak sang penguasa dan bersikap loyal. Inilah yang menjadi latarbelakang penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses transisi kekuasaan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tahun 1965 hingga 1968 dan keterlibatan ABRI serta mahasiswa di dalamnya. Seperti penulis sebutkan sebelumnya walaupun ABRI tidak punya kekuatan suara dan financial (keuangan), tetapi ABRI adalah salah kekuatan politik di Indonesia, ABRI sangat menentukan *state formation*. MacFarling (1996) mengungkapkan wujud dari dominasi ABRI tersebut tercermin pada yakni:

1. Strukur politik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, khususnya lembaga-lembaga birokrasi, terutama Departemen Dalam Negeri.
2. Pada lembaga parlemen, partai politik, dan kelompok kepentingan yang posisinya sangat lemah.
3. Pada tingkatan Massa melalui kebijakan massa mengambang.

Finer (2002) sementara itu menjelaskan bahwa model intervensi yang dilakukan militer melalui:

1. Saluran konstitusi yang resmi.
2. Kolusi dan atau kompetisi dengan otoritas sipil.
3. Intimidasi terhadap otoritas sipil.
4. Ancaman nonkoperasi dengan atau kekerasan terhadap otoritas sipil.
5. Penggunaan kekerasan pada otoritas sipil.

Tabel 1. Beberapa Tingkat Intervensi Politik Militer Dunia Ketiga

No.	Kategori Keterlibatan	Rincian Tingkat Keterlibatan
1.	Militer dilibatkan dalam Administrasi Pemerintahan	Para perwira militer melibatkan diri dalam kegiatan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses administrasi kebijakan pemerintahan
2	Militer dibiarkan memiliki partai politik	Militer diberikan kesempatan oleh mekanisme sistem politik untuk berpartai. Kesempatan berpartai ini bisa bersifat langsung, yaitu militer dibiarkan memiliki partai politik militer, atau tidak langsung, yaitu partai politik sipil yang dikendalikan atau dikuasai oleh militer.
3	Militer dilibatkan dalam posisi pemerintahan sipil	Melalui tokoh-tokohnya, militer terwakili dalam struktur pemerintahan sipil. Militer menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan
4	Militer dijadikan arbitrator atau wasit politik	Dalam keadaan pemerintahan sipil menghadapi krisis, militer dijadikan penengah untuk mengatasi dan mengendalikan krisis. Misal melalui pemberlakuan undang-undang darurat perang. Biasanya setelah menjadi wasit, militer akan melepas peranan politiknya

5	Terbentuk otokrasi miiter	dengan memanfaatkan posisi kewasitannya. Sebuah pemerintahan dipimpin seorang miiter, tapi sang pemimpin tidak memiliki pemerintahan atau kabinet miiter
6	Terbentuk oligarki militer	Militer sebagai kelompok kekuatan politik menguasai kabinet dan pemerintahan. Namun pemerintahan yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh militer. Sipil dilibatkan dalam pemerintahan. Ada <i>power sharing</i> antara militer dan sipil
7	Terbentuk militer pretorian militer	Kelompok militer menguasai hampir sepenuhnya pemerintahan. Namun masih ada fusi dengan kekuatan-kekuatan sipil. Dalam keadaan ini, sipil tidak memiliki kontrol efektif terhadap intervensi militer
8	Terbentuk junta militer	Militer berkuasa sepenuhnya dalam pemerintahan dengan mengabaikan kekuatan sipil. Kekuasaan dibentuk dengan cara represif dan koersif

Sumber data : Eep Saefullah Fatah; Majalah Indikator No. 23/Th. X/1996 dalam Iswandi, 1998)

Penulis teringat dengan peran besar militer dalam berbagai peristiwa besar dalam perjalanan bangsa Indonesia yang berhasil dikendalikan dan disesuaikan oleh miiter. Yakni, perang kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan, perang menjaga persatuan bangsa (disintegrasi bangsa), kekacauan politik demokrasi parlemen dan gerakan 30 September 1965.

Tabel 2. Faktor Intervensi Militer dalam Politik

Faktor	Penjelasan
Internal ABRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwira-perwira intervensionis terutama didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstitusional. 2. Intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal. 3. Kemahiran profesional di kalangan militer menyebabkan perwira-perwira percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil. 4. Intervensi militer dalam politik sebagai sebab ambisi pribadi perwira-perwira yang haus wibawa dan kuasa.
Eksternal ABRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi militer dalam politik sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. 2. Kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah (untuk kasus Indonesia terjadi pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin dan pada 1965) atau kelompok sipil dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas politik. 3. Kelompok sipil dianggap tidak mampu dalam melakukan modernisasi ekonomi. 4. Terjadinya disintegrasi nasional.

Sumber: Modifikasi dari Ulf Sundhaussen (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).

Peluang peran politik ABRI di Indonesia secara umum, khususnya pada persoalan partai politik, salah satunya disebabkan oleh masih rendah dan minimnya sistem politik/budaya politik

yang berlaku. Sistem politik/budaya politik yang ada juga memberikan ruang yang besar bagi militer untuk melakukan intervensi hal tersebut dikarenakan besarnya dominasi militer dalam membentuk struktur politik di masa Orde Baru (Gonceng, 2015). Sistem politik Indonesia yang dibentuk oleh tim pemikir militer ternyata membawa hasil yang cukup memuaskan bagi kelompoknya, terutama adanya peluang militer untuk mendominasi hampir seluruh kehidupan politik yang ada.

Tim Pemikir (*brain trust*) militer dibentuk oleh dua perwira militer, yakni Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani, yang berkoalisi dengan para intelektual muda Katolik, yaitu Center for Strategic and International Studies (CSIS). Untuk mencegah kesan bahwa penguasa orde baru (Dominasi ABRI dalam politik) adalah suatu pemerintahan militer, militer berupaya untuk menggandeng mitra politik sipil (kerjasama) yaitu dengan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya yang kemudian menjadi Golongan Karya (Golkar) (Sudjito, 2016). Nantinya, pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965, TNI-AD mulai mencari mitra untuk berkerjasama dalam menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno yakni, dengan memilih gerakan mahasiswa yang dikomandoi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

TNI-AD tidak Bisa melakukan perebutan kekuasaan langsung dikarenakan masih banyak pendukung Presiden Soekarno khususnya di Jawa Tengah dan Timur serta di TNI AL dan AU (Hasudungan, 2020). Menghindarkan pertumpahan darah yang besar melanda Indonesia maka TNI-AD memilih Gerakan Mahasiswa untuk melancarkan aksi-aksi penolakan dan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Soekarno sedangkan TNI-AD akan mengawal aksi-aksi tersebut sejalan dengan itu TNI-AD melakukan tekanan-tekanan terhadap Presiden Soekarno melalui militer angkatan darat (Raillon, 1989). Koalisi untuk membangun jaringan politik agar tetap berkuasa, tampaknya merupakan kepentingan utama pada masa itu. Hal ini berlanjut dengan dilucutnya kekuatan politik partai lama. Lalu mengapa hampir semua perwira militer TNI-AD dapat bersatu melawan Presiden Soekarno di bawah pimpinan Mayjend. Soeharto dan Jenderal A.H. Nasution? Berikut analisis dari (Luttwak, 1994);

Jika kita menghendaki seorang perwira Angkatan Darat dan memintanya untuk ikut serta dalam suatu kudeta, dia-asalkan bukan loyalis total-akan dihadapkan pada seperangkat pilihan, yang memiliki bahaya maupun peluang. Ajakan itu bisa saja hanya "pancingan" dari dinas keamanan untuk mengetahui loyalitasnya pada rezim. Ajakan itu bisa juga asli, tetapi bagian dari perencanaan yang tidak aman dan tidak efisien. Dan akhirnya, ajakan itu bisa datang dari suatu tim yang memiliki banyak peluang untuk berhasil. Seandainya ajakan itu hanyalah "pancingan", maka menerima ajakan berarti kehilangan pekerjaan bahkan lebih dari itu. Sedangkan kalau ajakan itu dilaporkan maka dia akan memperoleh imbalan untuk loyalitasnya. Kalau ajakan itu asli dia memiliki prospek yang belum pasti akan memperoleh keuntungan setelah kudeta berhasil, ketimbang keuntungan yang pasti kalau dia melaporkannya. Karena itu hal yang wajar bagi dia adalah melaporkan ajakan kudeta itu.

Hampir semua perwira TNI-AD menerima ajakan tersebut, maksudnya ajakan untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno di bawah pimpinan Mayjend. Soeharto dan Jenderal

A.H. Nasution, tidak sedikit perwira TNI-AD tersebut menerima keuntungan dari Mayjend. Soeharto atas loyalitas mereka. Terjawab sudah mengapa setelah Presiden Soekarno jatuh dari jabatan sebagai presiden dan digantikan oleh Jenderal Soeharto maka dimulailah dominasi TNI-AD dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia (Dwifungsi ABRI). Karena sebelumnya telah terjadinya sebuah bentuk kerjasama timbal-balik antar para perwira militer TNI-AD sebagai buah dari dalam menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno seperti diungkap oleh tim peneliti LIPI dan Edward Luttwak sebelumnya.

Trauma politik kalangan militer atas peran partai politik pada era demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin membawa dampak diterapkannya struktur politik yang mendominasi oleh militer. Sejak saat itu, mulailah fase marginalisasi partai politik melalui resrukturisasi politik orde baru, terutama untuk menyongsong Pemilihan Umum 1971. Sementara itu, kelompok militer masih belum menemukan jaringan dan patronase (perlindungan) untuk membuat partai politik yang kuat melawan partai lama. Mengantisipasi hal itu, sejak 1967-1969, ABRI mulai terlibat aktif menyusun kekuatan melalui partai politik dengan mengaktifkan Sekber Golkar yang dulu pernah ada. Dibanyak tempat, stukturanya diwarnai dengan stuktur kemiliteran. Seperti, di daerah tingkat II diketuai oleh Dandim (Komandan Distrik Militer), sementara di tingkat kecamatan diketuai Danramil (Komandan Rayon Militer). Pada fase itulah ABRI sebagai pemenang kunci kekuatan politik melawan komunisme, menentukan konsep-konsep politik melalui seminar-seminar Angkatan Darat I, dan lebih-lebih pada seminar Angkatan Darat II yang sebagian besar rumusannya dijadikan acuan dalam membuat struktur politik yang baru. Muncullah struktur politik bayangan antara struktur ABRI dengan struktur Departemen Dalam Negeri (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).

Fase berikutnya yang menarik adalah munculnya upaya untuk mempertahankan kekuasaan itu. Dengan demikian, ABRI, dalam kenyataan itu, telah berubah tidak hanya melindungi kepentingan kelas elit, tetapi juga sangat menentukan jalur politik, birokrasi, ekonomi, maupun sosial. Peran ABRI akhirnya berubah menjadi bagaimana mempertahankan keamanan dan stabilitas politik agar *status quo* semakin terjaga (Kamil, 2009). Hubungan semacam ini lalu disebut oleh banyak kalangan sebagai sistem otoriter birokratis, yaitu ketika seluruh stuktur politik, terutama tempat-tempat strategis dalam proses politik, dimasukinya, sebagai bagian dari strategi stabilitasasi politik dan pembangunan ekonomi.

Partai politik (Parpol) akhirnya hanya sebagai bagian dari marginalisasi struktur politik, bahkan boleh dibidang tidak mendapatkan tempat terhormat tidak seperti kondisi Parpol dewasa ini. Campur tangan pun kerap dilakukan terhadap Parpol. Pola inilah yang terus dikembangkan. Bahkan untuk mendapatkan legimitasi politik dari negara, partai kerap kali harus meminta campur tangan pihak militer, setiap kali mereka dilanda konflik. Tidak hanya sekedar itu, pola rekayasa dan manajemen konflik pun diterapkan sebagai upaya agar partai politik, kecuali Golkar, semakin lemah. Bermula dari kebijakan dari kebijakan penyederhanaan Parpol dari 10 partai menjadi 3

partai yakni Partai Persatuan Pembangunan, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (Hidayat, 2018). Secara sistematis hal tersebut termasuk kebijakan deparpolisasi dan depolitisasi masyarakat, yang tampak dari kebijakan massa mengambang dan monoloyalitas birokrasi.

Selain itu, militer juga memainkan peranan yang amat besar dalam manajemen konflik internal partai pascafusi 1973 (Romli, 2018). Kasus yang menimpa PDI dan PPP pascafusi menunjukkan kenderungan ini. Terakhir, kasus yang membuat nyata keterlibatan ABRI adalah munculnya peristiwa 27 Juli 1996, setelah sebelumnya berbagai rangkaian kejadian untuk menggusur Megawati dari panggung politik orde baru dilakukan. Dengan demikian, cap bahwa Parpol hanya sekedar stempel demokrasi kerap dipakai sebagai dasar analisis kepolitikan di Indonesia. Tidak hanya partai politik, Lembaga Perwakilan Rakyat pun mengalami nasib yang sama. Fungsi ditetapkannya pengangkatan ABRI di DPR semata-mata bertujuan agar deideologisasi semakin lancar diterapkan. Umumnya mereka berargumen bahwa ABRI duduk di DPR dalam rangka mengamankan UUD 1945 dan Pancasila (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).

Ketika krisis ekonomi mulai muncul pada periode kedua 1997 dan terus berlanjut hingga tahun 1999, berbagai tuntutan reformasi politik dan penghapusan peran militer dalam politik pun muncul ke permukaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1999) mengungkapkan ada dua kecenderungan umum, yaitu:

Pertama, keinginan agar perombakan struktur politik dilakukan sebagai bagian dari transisi politik. Kedua, tuntutan agar dwifungsi ABRI dihapuskan, ditiadakkannya wakil ABRI di DPR, dan ABRI hanya memiliki wakil di MPR. Pada masa ini pula muncul kembali kecenderungan bangkitnya kembali era partai politik, seperti yang terjadi pada masa awal kemerdekaan hingga masa transisi ke Demokrasi Terpimpin.

Mengenai reformasi di ABRI, Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi (Kadi, 2000) mengatakan:

Momentum Reformasi ini, sebenarnya harus digunakan TNI-AD untuk menuntaskan reformasi internalnya, mengembalikan kesetiaan TNI-AD pada rakyat Indonesia. Kesetiaan TNI-AD tidak lagi hanya diberikan untuk kepentingan seseorang atau segolongan orang. TNI-AD harus kembali kepada apa yang pernah diamanahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa "...Kesetiaan tentara adalah kepada ideologi negara yang berarti bahwa tentara senantiasa bersikap kritis terhadap keputusan-keputusan kabinet yang diilhami oleh paham ideologi golongan yang dianut oleh berbagai partai yang mendukung pemerintah, tentara menganggap diri mereka sebagai pengemban wawasan kenegaraan, dan bukan sebagai alat dari berbagai kabinet yang sedang berkuasa.

Walaupun orde baru yang dikenal sebagai rezim otoriter-militer telah runtuh pada 21 Mei 1998, akan tetapi, ABRI masih memberikan pengaruh yang kuat meskipun peran dwifungsi mereka dihilangkan secara konstitusional. Hal ini terutama disebabkan oleh kepentingan bisnis TNI yang substansial dan hubungan mereka yang berkelanjutan dengan para pemain politik utama (Carnegie, 2008). Bahkan, dinamika politik kontemporer Indonesia saat ini masih sulit mentiadakan pengaruh militer, seolah-olah kestabilan pemerintahan hanya dapat terwujud bilamana militer khususnya angkatan darat terlibat dalam kekuasaan tersebut. Peran aktif militer dalam ruang sipil semakin

menguat, khususnya di masa kekuasaan Presiden Joko Widodo yang sangat mengandalkan peran aktif militer dalam berbagai sektor publik (Jati, 2021).

Syahrul & Goncing (2020) mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 kelompok militer masih berupaya untuk mengisi jabatan sipil dan hal tersebut terkesan sangat dipaksakan dan dianggap politis. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, peran militer baik yang aktif maupun purnawirawan sangat penting dalam menggalang dan mengamankan kekuatan dukungan. Padahal, militer tidak punya kekuatan suara politik maupun financial, tetapi tidak sedikit Presiden, Wakil Presiden, Capres, dan Cawapres RI yang berlatarbelakang militer atau setidaknya membutuhkan dukungan purnawirawan militer baik secara langsung maupun tidak. Tidak sedikit juga para purnawirawan militer yang menjadi tokoh penting dalam partai politik dan ekonomi serta menjadi kunci stabilitas politik di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Materi pengayaan menjadi materi tambahan bagi peserta didik yang telah menguasai materi dasar yang disebutkan pada Kompetensi Dasar. Membuat materi pengayaan harus memperhatikan kompetensi dasar yang dipelajari. Pengayaan harus terhubung ke pengetahuan dan/atau materi sebelumnya untuk koneksi lintas kurikuler, menggunakan informasi data dan evaluasi yang sesuai sebagai pedoman untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting seperti tingkat membaca, kompetensi sejarah, dll. Guru menyediakan bahan yang benar-benar berkualitas tinggi. Kegiatan pengayaan harus memperhitungkan pilihan peserta didik. Sedangkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengajaran pengayaan yaitu, peserta didik, guru, media dalam pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan pengajaran pengayaan. Materi pengayaan mengenai dwifungsi ABRI dalam politik Indonesia ditujukan pada kelas XII mata pelajaran sejarah Indonesia. Khususnya pada Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, KD 3.4 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan KD 3.5 Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dalam Silabus sejarah Indonesia pada kurikulum 2013 revisi. Diharapkan materi pengayaan ini dapat memperlengkapi peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) khususnya sejarah militer dan tentara di Indonesia, berpikir historis (*historical thinking*), kesadaran sejarah (*historical consciousness*). Selain itu, peserta didik mampu menguasai materi tingkat lanjut khususnya untuk menjawab soal (*Higher Order Thinking Skills*) HOTS berkaitan sejarah dwifungsi ABRI dalam politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, M. (Ed.). (2017). Library Research. In *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods*. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320: SAGE Publications, Inc.

Retrieved from <https://doi.org/10.4135/9781483381411.n296>

- Antari, N. K. Y. T., Wendra, I. W., & Wisudariani, N. M. R. (2017). Pelaksanaan Pengajaran Pengayaan Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas Xi Tkj2 Smk Negeri 3 Singaraja. *E-Journal Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Undoksha*, 7(2). Retrieved from <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jjpbs.v7i2.11251>
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23. Retrieved from <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 154–179. Retrieved from <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & Fitzgerald, W. T. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Carnegie, P. J. (2008). Democratization and Decentralization in Post-Soeharto Indonesia: Understanding Transition Dynamics. *Pacific Affairs*, 81(4), 515–525. Retrieved from <https://doi.org/10.5509/2008814515>
- Cipta, S. E. (2020). Learning From Personality A.H. Nasution: Starting from Glory to Getting Out of the Political and Military Stage in Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 18–26. Retrieved from <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.6>
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Darwati. (2011). Pemanfaatan Buku Teks Oleh Guru Dalam Pembelajaran Sejarah: Studi Kasus Di Sma Negeri Kabupaten Semarang. *Paramita - Historical Studies Journal*, 21(1), 75–89. Retrieved from <https://doi.org/10.15294/paramita.v21i1.1030>
- Feith, H. (1964). President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle Changes Shape. *Asian Survey*, 4(8), 969–980. Retrieved from <https://doi.org/10.2307/2642634>
- Finer, S. E. (2002). *The Man on Horseback The Role of the Military in Politics*. Routledge.
- Goncing, N. (2015). Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 61–74. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/134>
- Hasibuan, A. Z., & Aisiah. (2020). Pelaksanaan Remedial dan Pengayaan dala Pembelajaran Sejarah di SMA A Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 434–44. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v4i1.480>
- Hasudungan, A. N. (2020). TNI-AD dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam Kelengseran Soekarno Tahun 1965-1968. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(1), 28–37. Retrieved from <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173>
- Hidayat, A. (2018). PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU (1966-1998).

- Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 155–164. Retrieved from <https://doi.org/10.21009/jimnd.v17i2.9090>
- Iswandi. (1998). *Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi dan pengaruhnya terhadap pembentukan rezim otoriter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jati, W. R. (2021). *Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021* (No. 21). *The Habibie Center THC Insights*. Retrieved from Jakarta: <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/ac06aed73a921420af78a420d4f6f50c.pdf>
- Jenkins, D. (1983). The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi. *Asian Journal of Social Science*, 11(1), 15–30. Retrieved from <https://doi.org/10.1163/080382483X00103>
- Kadi, S. (2000). *TNI-AD Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kamil, H. N. (2009). *Militer dan Kekuatan Politik : Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan*. Retrieved from Jakarta: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7541/1/HADI_NAFIS_KAMIL-FUH.pdf
- Krismawati, N. U., Warto, W., & Suryani, N. (2018). Analisis Kebutuhan pada Bahan Ajar Penelitian dan Penulisan Sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 3(3), 300. Retrieved from <https://doi.org/10.28926/briliant.v3i3.202>
- Lailiyah, N. H. (2017). *PENERAPAN METODE ENRICHMENT MODEL RENZULLI PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MTS SABILUL ULUM MAYONG JEPARA TAHUN PELAJARAN 2017/2018*. *Physics Letters A* (Vol. 137). Retrieved from Kudus: http://eprints.stainkudus.ac.id/2074/5/FILE_5_BAB_II.pdf
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (1999). *Tentara Mendamba Mitra*. Jakarta: PPW-LIPI & Mizan Pustaka.
- Leni, N. (2013). Keterlibatan militer dalam kancah politik di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 45. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1574/1301>
- Luttwak, E. (1994). *Kudeta: Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Maarif, S. (2011). *Militer dalam Parlemen 1960-2004: seri kajian sosiologi militer*. Jakarta: Prenada.
- MacFarling, I. (1996). *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Military Politics in Indonesia*. Canberra: Australian Defence Studies Centre.
- Maulana, A., & Santosa, A. B. (2019). Peristiwa 17 Oktober 1952: Tentara Pretorian Moderator dengan Gerakan Anti-Parlemen Pada Masa Kabinet Wilopo. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 47–56. Retrieved from <https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20116>
- Nurhuda, A., & Agesti, Y. Z. (2021). MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-

- 2001). *TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION*, 3(1), 114–124. Retrieved from <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tarikhuna/article/view/2949/1950>
- Pramudita, A. A. (2017). *PERANAN TENTARA PELAJAR DI KULON PROGO DALAM PERANG KEMERDEKAAN II 1948-1949*. Retrieved from Yogyakarta: <http://eprints.uny.ac.id/53646/8/7>. Jurnal Fix 13407141057.pdf
- Raillon, F. (1989). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES.
- Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2), 95–118. Retrieved from <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>
- Sjuchro, D. W., & Besman, A. (2020). Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966). *Representamen*, 6(02), 70–80. Retrieved from <https://doi.org/10.30996/representamen.v6i02.4270>
- Sudjito, G. (2016). NEGARA DAN GOLKAR (Studi tentang Konfigurasi Politik Indonesia 1971-2009). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01), 202–215. Retrieved from <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.708>
- Surya, R. A., & Nurdin, E. A. (2021). Utilizing the enrichment triad model in history learning: a conceptual framework. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(1), 139–147. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.26717>
- Suryawan, I. P. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2020). IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(2), 182–191. Retrieved from <https://doi.org/10.36733/jsp.v10i2.1092>
- Syahrul, F., & Gocning, M. A. (2020). Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 75. Retrieved from <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>
- Taylor, W. (2019). Enrichment in the Classroom. Retrieved from <https://learningessentialsedu.com/enrichment-in-the-classroom/>
- Utomo, H. K. (2019). Dinamika Politik yang menyebabkan kemunculan Bisnis Militer di Indonesia antara tahun 1957 dan tahun 1959. *Jurnal Communitarian*, 2(1), 134–146. Retrieved from <http://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/93/63>